



2024

POTENSI

Kelurahan

Bukit Pinang



KATA PENGANTAR



Desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia yang kaya, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi desa agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi desa adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengenali dan mengembangkan potensi desa, kita dapat menciptakan kesempatan baru untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Samarinda, 30 Juli 2025

Lurah,

EKO PURWANTO, SE, MM
NIP. 198107122002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
Sekilas Pendataan Potensi Desa 2024	8
IDENTITAS KELURAHAN	10
KETERANGAN UMUM KELURAHAN	12
A. Kondisi Umum Wilayah	12
B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	13
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16
A. Kawasan Perumahan dan Infrastruktur	16
B. Kondisi Akses Listrik di Kelurahan Bukit Pinang	17
C. Peran Listrik dalam Mendukung Lingkungan Tangguh dan Hunian Layak ..	18
D. Kondisi Lingkungan	19
E. Pengelolaan Sampah	22
F. Air Bersih	23
G. Lokasi Permukiman	24
H. Pencemaran Lingkungan Hidup	25
I. Bencana Alam Dan Mitigasi Bencana Alam	26
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	30
A. Pendidikan	30
B. Kesehatan	34
SOSIAL BUDAYA	44
OLAHRAGA DAN HIBURAN	48
ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI	54
EKONOMI	60
KEAMANAN	66
PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70
KETERANGAN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bencana Alam Tahun 2023-2024	26
Gambar 3.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Milik Desa/Kelurahan & Bukan Milik Desa/Kelurahan	33
Gambar 3.2 Jumlah Sarana Kesehatan.....	35
Gambar 3.3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	39
Gambar 3.4 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan.....	40
Gambar 3.5 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan.....	42
Gambar 4.1 Jumlah Tempat Ibadah	45
Gambar 5.1 Jarak Waktu Tempuh dari Kantor Lurah	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Topografi dan Keberadaan Pemukiman	13
Tabel 2.1 Penggunaan Listrik Kelurahan Bukit Pinang.....	17
Tabel 2.2 Bahan Bakar untuk Memasak	20
Tabel 2.3 Tempat Buang Sampah.....	22
Tabel 2.4 Fasilitas Pengelolaan Sampah.....	23
Tabel 2.5 Penggunaan air.....	24
Tabel 2.6 Penggunaan Sumber Air	24
Tabel 2.7 Lokasi Permukiman	25
Tabel 2.8 Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi).....	25
Tabel 2.9 Keberadaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah Selama 3 Tahun Terakhir	26
Tabel 2.10 Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam	27
Tabel 2.11 Kegiatan Siaga Bencana	27
Tabel 3.1 Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta	30
Tabel 3.2 Kegiatan Penunjang Pendidikan	32
Tabel 3.3 Jumlah Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Pinang.....	35
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Kesehatan	36
Tabel 3.5 Jarak Fasilitas Kesehatan Terdekat.....	37
Tabel 3.6 Kemudahan Mencapai Fasilitas Kesehatan Terdekat	39
Tabel 3.7 Jenis KLB/Wabah Penyakit	41
Tabel 3.8 Jumlah Penyandang Disabilitas	41
Tabel 4.1 Agama/Kepercayaan Penduduk.....	44
Tabel 5.1 Jumlah Fasilitas Olahraga.....	49
Tabel 5.2 Keberadaan Kelompok Kegiatan Olahraga	49
Tabel 5.3 Banyaknya Fasilitas Olahraga	50
Tabel 6.1 Angkutan Umum yang Melewati Kelurahan/Desa	54
Tabel 6.2 Sarana Transportasi Umum yang Biasa Digunakan	55
Tabel 6.3 Sarana Media	56
Tabel 7.1 Beberapa Lembaga Keuangan	61
Tabel 7.2 Ketersediaan Bahan Bakar Gas dan Minyak Tanah	61
Tabel 7.3 Infrastruktur Ekonomi.....	62
Potensi Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu	5

Tabel 8.1 Tindak Kejahatan.....	66
Tabel 8.2 Fasilitas Keamanan Lingkungan.....	67
Tabel 8.3 Kerawanan Sosial dan Ketertiban Umum.....	67
Tabel 9.1 Perlindungan Sosial	70
Tabel 9.2 Kegiatan Pembangunan Masyarakat.....	71
Tabel 10.1 Keterangan Aparatur Pemerintah Kelurahan.....	74
Tabel 10.2 Perangkat Kelurahan Bukit Pinang.....	75



**SEKILAS
PENDATAAN
PODES 2024**



Sekilas Pendataan Potensi Desa 2024

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Podes 2024 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

Pengumpulan data Podes 2024 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2024. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui situs web.





IDENTITAS KELURAHAN



IDENTITAS KELURAHAN

Kelurahan Bukit Pinang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Adapun alamat kantor Kelurahan Bukit Pinang terletak di Jalan Pangeran Suryanata RT 17, Poros Samarinda–Tenggarong, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos: 75124.

Kelurahan Bukit Pinang memiliki kondisi geografis yang strategis, dengan akses yang mudah ke pusat kota Samarinda. Penduduk Kelurahan Bukit Pinang terdiri dari berbagai etnis dan agama, yang hidup harmonis dan rukun. Perekonomian Kelurahan Bukit Pinang didukung oleh berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil. Kelurahan Bukit Pinang memiliki berbagai fasilitas, seperti sekolah, puskesmas, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Kelurahan Bukit Pinang memiliki kekayaan budaya yang beragam, dengan berbagai tradisi dan kegiatan masyarakat yang unik.

Demikian identitas singkat Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu Provinsi Kalimantan Timur.





KETERANGAN UMUM KELURAHAN



KETERANGAN UMUM KELURAHAN

A. Kondisi Umum Wilayah

Kelurahan Bukit Pinang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kelurahan Bukit Pinang terletak pada kawasan dataran rendah hingga perbukitan dengan rentang elevasi antara 0 hingga sekitar 80 meter di atas permukaan laut (mdpl). Letak topografi yang bervariasi ini menjadikan wilayah Bukit Pinang memiliki perbedaan karakteristik morfologi antar kawasan.

Secara lebih rinci, mayoritas wilayah permukiman penduduk berada pada ketinggian antara 0–30 mdpl, yang dikategorikan sebagai dataran rendah. Wilayah ini relatif datar dengan kemiringan lereng yang sangat landai, sehingga cocok untuk pemukiman, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Kawasan ini juga merupakan wilayah yang paling padat penduduknya, mencakup sebagian besar dari 21 Rukun Tetangga (RT) yang ada di lingkungan Kelurahan Bukit Pinang.

Sementara itu, bagian lain dari kelurahan ini, khususnya yang berada di pinggiran atau sisi barat dan selatan, memiliki elevasi yang lebih tinggi, yakni antara 30 hingga 80 mdpl. Area ini merupakan kawasan perbukitan yang morfologinya ditandai oleh lereng-lereng sedang hingga curam, meskipun tetap berada dalam kategori perbukitan rendah. Kawasan ini umumnya belum sepenuhnya terbangun secara intensif, dan sebagian masih digunakan sebagai lahan terbuka, semak belukar, atau perkebunan rakyat.

Letak geografis Kelurahan Bukit Pinang yang berada di wilayah transisi antara dataran rendah dan perbukitan rendah menjadikannya strategis untuk pengembangan wilayah yang terpadu. Selain itu, variasi elevasi ini juga mempengaruhi tata guna lahan, potensi bencana seperti genangan air di musim hujan pada area dataran rendah, serta keterbatasan aksesibilitas pada wilayah berbukit.

Dari segi koordinat geografis, secara umum, Kelurahan Bukit Pinang berada pada kisaran koordinat lintang selatan sekitar 0°31' – 0°33' LS dan bujur timur 117°07' – 117°09' BT. Iklim di wilayah ini termasuk dalam iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan yang tinggi dan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 32°C.

Dengan kondisi topografi yang demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Kelurahan Bukit Pinang memerlukan pendekatan yang

sensitif terhadap variasi elevasi dan kondisi tanah, terutama dalam pengelolaan drainase, pengendalian banjir, serta penataan kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau. Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang:

Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara

Timur : Kecamatan Samarinda Utara

Selatan : Kelurahan Air Putih

Barat : Kecamatan Sungai Kunjang

Tabel 1.1 Topografi dan Keberadaan pemukiman

Spesifikasi Wilayah	Keterangan
Topografi Sebagian Besar wilayah desa/kelurahan	Lereng
Keberadaan permukiman penduduk di puncak/tebing/lereng	Ada
Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	Tidak Ada
Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan/hutan	Diluar Kawasan Hutan

Kantor Lurah Bukit Pinang beralamat di Jl. Pangeran Suryanata RT 17, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bangunan kantor saat ini berada di lahan milik Pemerintah Kota Samarinda yang sebelumnya menjadi terminal eks-Dishub dan hingga beberapa tahun masih disewa, rencananya akan dibangun gedung permanen pada lokasi tersebut dengan biaya sekitar Rp 2,3 miliar. Kantor Kelurahan Bukit Pinang saat ini belum memenuhi kelayakan infrastruktur secara penuh baik dari segi kepemilikan aset. Kelayakan infrastruktur bersifat sementara dan adaptif, dengan kebutuhan mendesak untuk pembangunan gedung permanen yang terstandarisasi demi mendukung tata kelola pemerintahan kelurahan yang profesional, efisien, dan partisipatif.

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data administrasi terakhir yang dihimpun dari Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, jumlah penduduk di wilayah ini tercatat sebanyak 12.266 jiwa. Penduduk pada Kelurahan Bukit Pinang tersebar di 21 Rukun Tetangga

(RT), dengan kepadatan yang relatif tinggi terutama di wilayah dataran rendah. Secara sosiokultural, masyarakat Kelurahan Bukit Pinang memiliki karakter yang multietnis dan multireligius. Beberapa etnis besar yang mendiami wilayah ini antara lain etnis Banjar, Bugis, Jawa, Kutai, Dayak, dan Toraja, serta penduduk dari latar belakang etnis lainnya. Keragaman ini turut memperkaya budaya lokal serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan rukun. Tidak hanya dari sisi etnis, keberagaman juga terlihat dalam sisi agama. Penduduk Bukit Pinang memeluk berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, dengan kehidupan beragama yang dijalankan secara damai dan saling menghormati.

Dalam bidang ketenagakerjaan, mayoritas penduduk usia produktif di Kelurahan Bukit Pinang bekerja di sektor informal, perdagangan, jasa, dan industri kecil-menengah. Beberapa juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, maupun buruh harian. Kegiatan usaha seperti warung, kios kelontong, jasa laundry, transportasi online, hingga usaha rumah tangga menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi lokal. Potensi angkatan kerja yang besar di kelurahan ini menjadikan isu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan modal UMKM sebagai hal yang strategis untuk pembangunan ekonomi wilayah. Di sisi lain, tantangan seperti pengangguran terbuka dan pekerja sektor informal tanpa jaminan kerja juga menjadi perhatian dalam penyusunan program-program kelurahan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Kawasan Perumahan dan Infrastruktur

Kota Samarinda merupakan salah satu kota besar di Kalimantan Timur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Letak geografisnya yang berada di dataran rendah, ditambah dengan tingginya intensitas curah hujan dan alih fungsi lahan yang masif, menyebabkan banyak wilayah di Samarinda, termasuk kawasan permukiman, mengalami genangan bahkan banjir tahunan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, terdapat lebih dari 50 titik rawan banjir di wilayah kota, yang sebagian besar berada di wilayah dengan drainase tidak memadai dan tata ruang yang belum tertata dengan baik (BPBD Kota Samarinda, 2023). Salah satu wilayah yang terdampak potensi banjir adalah Kelurahan Bukit Pinang, yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu. Kawasan ini memiliki karakter topografi yang bervariasi, dari dataran rendah (0–30 meter di atas permukaan laut) hingga perbukitan rendah (hingga 80 mdpl). Permukiman padat penduduk di Bukit Pinang umumnya terkonsentrasi di wilayah dataran rendah, yang juga merupakan area dengan sistem drainase terbatas dan daya serap tanah yang rendah. Beberapa kawasan permukiman bahkan dibangun tanpa perencanaan infrastruktur yang matang atau tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga meningkatkan risiko banjir, terutama pada musim hujan. Wilayah sekitar jalan poros dan area permukiman padat RT yang berdekatan dengan aliran air permukaan sering mengalami genangan, yang diperparah oleh tumpukan sampah serta aliran air yang tersumbat.

Menanggapi kondisi tersebut, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk menanggulangi dan mengurangi dampak banjir di Kelurahan Bukit Pinang. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir

Seperti perbaikan sistem drainase lingkungan, pembangunan tanggul pengarah air, saluran air beton, dan kolam retensi. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengendalikan aliran air agar tidak meluap ke permukiman.

2. Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Melarang pembangunan di daerah sempadan sungai dan zona rawan banjir, melakukan penghijauan dan reboisasi di kawasan perbukitan, serta mengedukasi

masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya guna mencegah penyumbatan saluran air.

3. Edukasi masyarakat

Pemberian edukasi mengenai risiko banjir dan langkah-langkah mitigasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, kesiapsiagaan menghadapi banjir, serta cara-cara darurat menyelamatkan diri saat bencana terjadi.

4. Penguatan kerja sama multipihak

Di mana pemerintah, warga, dan lembaga terkait seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta LSM lingkungan bekerja secara sinergis dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan risiko banjir di Kelurahan Bukit Pinang dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

B. Kondisi Akses Listrik di Kelurahan Bukit Pinang

Energi listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat modern. Keberadaan listrik tidak hanya menunjang aktivitas rumah tangga, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta sistem komunikasi dan informasi. Dalam konteks pembangunan wilayah, ketersediaan dan pemerataan akses listrik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah.

Tabel 2.1 Pengguna listrik Kelurahan Bukit Pinang

Pengguna listrik	Jumlah Keluarga
Pengguna listrik PLN	2.343
Pengguna listrik Non PLN	0

Berdasarkan data pada tabel di atas, tercatat bahwa sebanyak 2.343 keluarga atau hampir seluruh rumah tangga yang ada di wilayah ini merupakan pengguna listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara itu, tidak terdapat keluarga yang menggunakan listrik non-PLN, seperti genset pribadi atau panel surya. Hal ini menandakan bahwa sistem distribusi listrik dari PLN telah menjangkau secara merata ke seluruh lingkungan permukiman di Bukit Pinang. Akses yang merata terhadap listrik

memberikan banyak manfaat. Di bidang ekonomi, listrik memungkinkan pelaku usaha rumahan seperti laundry, penjahit, dan warung makan untuk beroperasi secara efisien. Di bidang pendidikan, anak-anak memiliki akses penerangan yang cukup untuk belajar di malam hari. Dari sisi sosial, penerangan jalan dan lingkungan juga mendukung keamanan dan kenyamanan warga. Meskipun cakupan listrik PLN sudah hampir menyeluruh, penting juga untuk memperhatikan kualitas layanan, seperti kestabilan tegangan, ketersediaan daya pada jam-jam beban puncak, dan penanganan gangguan. Di beberapa titik, terutama wilayah yang berbatasan dengan kawasan perbukitan atau pemukiman baru, masih ditemukan potensi keterbatasan jaringan atau perlunya penguatan infrastruktur distribusi.

C. Peran Listrik dalam Mendukung Lingkungan Tangguh dan Hunian Layak

Dalam konteks perumahan dan mitigasi risiko bencana, ketersediaan listrik juga berperan penting dalam membangun lingkungan yang tangguh. Perangkat peringatan dini (early warning system), pompa air untuk banjir, dan sistem drainase aktif, semuanya memerlukan suplai listrik yang stabil untuk dapat berfungsi optimal. Demikian pula, pada saat terjadi bencana, ketersediaan listrik sangat krusial untuk operasional posko darurat, penerangan jalan, serta komunikasi antarwarga dan instansi penyelamat. Listrik juga berkontribusi pada kualitas hidup melalui keberadaan fasilitas dasar rumah tangga seperti lemari pendingin, kipas angin, penerangan, dan alat elektronik lainnya. Dalam jangka panjang, listrik mendukung kelayakan hunian karena berkaitan langsung dengan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan penghuni.

Oleh karena itu, meskipun data menunjukkan bahwa seluruh keluarga di Kelurahan Bukit Pinang telah menikmati listrik dari PLN, pembangunan ke depan perlu tetap memperhatikan aspek penguatan daya cadangan, integrasi dengan sumber energi terbarukan, serta optimalisasi efisiensi energi di tingkat rumah tangga. Langkah-langkah seperti penyediaan lampu hemat energi (LED), edukasi penggunaan alat elektronik secara bijak, serta instalasi panel surya pada fasilitas umum dapat menjadi inisiatif strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sadar energi. Menariknya, tidak terdapat keluarga yang menggunakan listrik non-PLN maupun yang sama sekali tidak memiliki akses listrik. Kondisi ini menjadi modal penting dalam membangun ketahanan lingkungan, karena dengan adanya listrik yang merata, berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi kebencanaan, hingga pengoperasian sistem peringatan dini (early warning system) dapat dijalankan secara lebih efektif dan terintegrasi. Di sisi lain,

capaian ini juga mencerminkan bahwa pemerataan layanan dasar di sektor kelistrikan di Kelurahan Bukit Pinang telah berjalan cukup baik, sekaligus mendukung terciptanya hunian yang layak dan berwawasan keberlanjutan. Namun, keberadaan infrastruktur seperti listrik ini juga harus diiringi dengan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada energi listrik perlu disandingkan dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah, menjaga kawasan hijau, dan menghindari pembangunan di zona rawan banjir agar pembangunan tidak hanya merata, tetapi juga aman bagi generasi mendatang.

D. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan Kelurahan Bukit Pinang dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Kualitas Air

Kualitas air di Kelurahan Bukit Pinang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti polusi, limbah, dan pengelolaan air yang tidak baik.

2. Kualitas Udara

Kualitas udara di Kelurahan Bukit Pinang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti polusi udara, asap kendaraan, dan industri.

3. Pengelolaan Sampah

Pegelolaan sampah di Kelurahan Bukit Pinang dapat mempengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan.

4. Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan di Kelurahan Bukit Pinang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan sampah, drainase, dan kesadaran masyarakat.

5. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan di Kelurahan Bukit Pinang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembangunan yang tidak terkendali, penebangan hutan, dan polusi. Untuk meningkatkan kondisi lingkungan di Kelurahan Bukit Pinang, perlu dilakukan paya - upaya seperti:

- a. Pengelolaan sampah yang baik.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kondisi lingkungan di Kelurahan Bukit Pinang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data kebutuhan gas dan listrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Bahan Bakar untuk Memasak

Bahan Bakar untuk Memasak	Ada	Tidak ada
Listrik	Ada	-
Elpiji 5,5 kg/blue gaz	Ada	-
Elpiji 12 kg	Ada	-
Elpiji 3 kg	Ada	-
Gas kota	-	Tidak ada
Biogas	-	Tidak ada
Minyak tanah	-	Tidak ada
Briket	-	Tidak ada
Arang	-	Tidak ada
Kayu bakar	-	Tidak ada
Lainnya	-	Tidak ada

Berdasarkan tabel kebutuhan energi rumah tangga untuk memasak di Kelurahan Bukit Pinang, terlihat bahwa masyarakat secara umum telah menggunakan bahan bakar modern dan bersih. Seluruh jenis energi utama yang digunakan untuk memasak di wilayah ini mencakup listrik, Elpiji 3 kg, Elpiji 5,5 kg atau Blue Gaz, dan Elpiji 12 kg, yang semuanya tersedia dan digunakan oleh rumah tangga. Sementara itu, tidak terdapat penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar, arang, briket, minyak tanah, biogas, gas kota, maupun sumber lain. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat telah beralih dari energi konvensional yang bersifat polutif dan tidak efisien menuju bahan bakar yang lebih bersih, praktis, dan ramah lingkungan.

Kondisi ini menjadi indikator positif dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemakaian Elpiji dan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak mencerminkan tingkat akses energi bersih yang tinggi, serta keterjangkauan pasokan bahan bakar tersebut di tingkat lokal. Hal ini juga memperlihatkan adanya pemahaman masyarakat terhadap efisiensi energi, serta keberhasilan distribusi energi bersubsidi seperti Elpiji 3 kg, yang banyak digunakan oleh rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah. Tidak digunakannya bahan bakar seperti minyak tanah, kayu bakar, dan arang juga menunjukkan adanya pergeseran

perilaku konsumsi energi yang lebih modern dan berwawasan lingkungan. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada efisiensi rumah tangga, tetapi juga turut menurunkan potensi pencemaran udara dalam rumah dan risiko kesehatan akibat paparan asap dari pembakaran bahan bakar padat.

Dengan demikian, kombinasi antara tersedianya energi listrik, akses penuh terhadap berbagai jenis Elpiji, serta absennya penggunaan bahan bakar konvensional di Kelurahan Bukit Pinang menjadi landasan kuat bagi upaya peningkatan ketahanan energi di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuka peluang penguatan program energi bersih, kampanye efisiensi energi rumah tangga, dan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung pembangunan wilayah yang lebih sehat, modern, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut kondisi rumah warga di Kelurahan Bukit Pinang dapat bervariasi, namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tipe Rumah

Rumah-rumah di Kelurahan Bukit Pinang dapat berupa rumah permanen, semi - permanen, atau rumah sederhana.

2. Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan rumah dapat bervariasi, dari yang sederhana hingga yang lebih modern dan kokoh.

3. Fasilitas

Fasilitas rumah dapat meliputi listrik, air, sanitasi, dan lain-lain.

4. Kepadatan

Kepadatan hunian dapat mempengaruhi kondisi rumah, terutama jika rumah dihuni oleh banyak orang.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan rumah dapat mempengaruhi kondisi rumah, terutama jika rumah tidak dirawat dengan baik.

Beberapa kondisi rumah warga di Kelurahan Bukit Pinang adalah:

1. Rumah yang layak huni dengan fasilitas yang memadai
2. Rumah yang sederhana dengan fasilitas yang terbatas
3. Rumah yang tidak layak huni karena kerusakan atau kekurangan fasilitas

Untuk meningkatkan kondisi rumah warga di Kelurahan Bukit Pinang, perlu dilakukan upaya-upaya seperti:

1. Program pembangunan rumah layak huni
2. Peningkatan fasilitas rumah
3. Pemeliharaan rumah yang baik
4. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga rumah yang sehat dan layak huni.

Tabel 2.3 Tempat Buang Sampah

Tempat Buang Sampah	Keberadaan Keluarga yang Menggunakan	
	Ada	Tidak ada
Tempat sampah, kemudian diangkut	Ada	-
Dalam lubang atau dibakar	-	Tidak ada
Sungai/saluran irigasi/danau/laut	-	Tidak ada
Drainase (got/selokan)	-	Tidak ada
Lainnya	-	Tidak ada

Pada tabel 2.3 diatas tampak bahwa sebagian besar kondisi rumah di Kelurahan Bukit Pinang sudah menuju ke arah rumah yang sehat salah satunya dengan memiliki tempat sampah yang kemudian diangkut oleh petugas sampah. Himbauan untuk tidak membakar sampah pun telah dipatuhi oleh warga kelurahan Bukit pinang yang ditunjukkan dengan tidak adanya proses pembakaran sampah demi menjaga kualitas udara.

E. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kelurahan Bukit Pinang dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Pengumpulan Sampah. Pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga dan tempat-tempat umum.
2. Pengangkutan Sampah. Pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan sampah.
3. Pengolahan Sampah: Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembakaran (insinerasi)
 - b. Pengomposan
 - c. Daur ulang

4. Pembuangan Sampah: Pembuangan sampah yang aman dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

Beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bukit Pinang dapat meliputi:

1. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik
3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk pengelolaan sampah

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kelurahan Bukit Pinang, perlu dilakukan upaya - upaya seperti:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
2. Meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
3. Mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain dalam pengelolaan sampah.

Tabel 2.4 Fasilitas Pengelolaan Sampah

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	Ada	-
Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)		Tidak ada
Keberadaan bank sampah	Ada	-

F. Air Bersih

Air bersih adalah air yang memenuhi standar kualitas yang aman untuk dikonsumsi dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti minum, memasak, dan membersihkan diri. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Tabel 2.5 Penggunaan Air

Penggunaan Air	Sumber air yang digunakan sebagian besar keluarga
Air untuk Minum	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)
Air untuk Mandi/cuci	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, air bersih sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, dan perlu diolah dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaannya. Dengan demikian, air bersih sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, dan perlu diolah dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaannya.

Tabel 2.6 Penggunaan Sumber Air

Penggunaan Sumber Air	Sungai		Danau/Waduk/Situ/Bendungan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mandi/cuci	-	Tidak	-	Tidak
Sumber Air minum/masak	-	Tidak	-	Tidak
Pengairan/Irigasi Lahan Pertanian	-	Tidak	Ya	-
Pariwisata (komersial)	-	Tidak	-	Tidak
Perikanan	-	Tidak	-	Tidak
Transportasi	-	Tidak	-	Tidak
Pembangkit Listrik	-	Tidak	-	Tidak
Industri/pabrik	-	Tidak	-	Tidak
Lainnya	-	Tidak	-	Tidak

G. Lokasi Permukiman

Listrik memungkinkan penggunaan berbagai peralatan dan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup. Jaringan listrik merupakan sistem yang kompleks dimana terdiri dari beberapa komponen penting untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Keberadaan wilayah permukiman dibawah sutet ataupun di bantaran sungai merupakan wilayah yang berbahaya untuk dijadikan pemukiman

penduduk. Sehingga kondisi kelurahan Bukit Pinang dengan tidak adanya pemukiman dibawah SUTET/SUTT/SUTAS dan di bantaran sungai merupakan hal yang sangat baik.

Tabel 2.7 Lokasi Permukiman

Lokasi Permukiman	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Di Bawah SUTET/SUTT/SUTAS	-	Tidak ada
Di Bantaran Sungai	-	Tidak ada

H. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi di mana lingkungan hidup terkena dampak negatif akibat adanya zat-zat atau bahan-bahan berbahaya yang masuk ke dalam lingkungan. Pada wilayah kelurahan Bukit Pinang masih ditemukan pencemaran air dan udara yang utamanya bersumber dari pabrik yang berada di sekitaran wilayah Bukit Pinang.

Tabel 2.8 Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi)

Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi)	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Air	Ada	-
Tanah	-	Tidak ada
Udara	Ada	-

Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang kegiatan pelestarian lingkungan, dimana pada kelurahan Bukit Pinang telah dilakukan beberapa kegiatan pelestarian lingkungan selama 3 tahun terakhir dimana kegiatan-kegiatan ini melibatkan sebagian warga. Hal ini menunjukkan peran aktif warga dan pihak kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan.

Tabel 2.9 Keberadaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah Selama 3 Tahun Terakhir

Keberadaan Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama 3 tahun terakhir	Ada, sebagian warga terlibat	Ada, Warga tidak terlibat	Tidak ada kegiatan
Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan	Ada, sebagian warga terlibat	-	-
Pengolahan/daur ulang sampah (reuse, recycle) oleh masyarakat desa/kelurahan	Ada, sebagian warga terlibat	-	-
Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian	Ada, sebagian warga terlibat	-	-

I. Bencana Alam Dan Mitigasi Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian besar pada lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan manusia.



Gambar 2. 1 Bencana Alam Tahun 2023-2024

Peringatan bencana adalah sistem peringatan yang digunakan untuk memberitahu masyarakat tentang potensi bencana alam atau buatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian.

Tabel 2.10 Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam

Fasilitas/ upaya antisipasi/mitigasi bencana alam	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Sistem peringatan dini bencana alam	-	Tidak ada
Sistem peringatan dini khusus tsunami	-	Tidak ada
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada	
Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada	-
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. selama 3 tahun terakhir	Ada	-

Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah bencana terjadi.

Tabel 2. 11 Kegiatan Siaga Bencana

Jenis Kegiatan Siaga Bencana	Partisipasi Warga Kelurahan yang pernah mengikuti		
	Sebagian Besar	Sebagian Kecil	Tidak Ada
simulasi kesiapsiagaan bencana	-	Sebagian Kecil	-
gladi ruang kesiapsiagaan bencana	-	Sebagian Kecil	-
sertifikasi pelatihan penanggulangan bencana	-	Sebagian Kecil	-

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi warga dalam ketiga jenis kegiatan tersebut masih tergolong rendah. Semua kegiatan hanya diikuti oleh sebagian kecil warga, dan tidak ada kegiatan yang menunjukkan partisipasi dalam jumlah besar maupun yang sama sekali tidak diikuti. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana masih terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pelatihan secara lebih luas agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana di wilayahnya.





PENDIDIKAN DAN KESEHATAN



PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan potensi wilayah. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas individu maupun kolektif dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Dalam konteks pembangunan wilayah, keberadaan lembaga pendidikan yang memadai tidak hanya menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah.

Tabel 3.1 Jenjang Pendidikan Negeri Dan Swasta

Jenis / Jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan	
	Negeri	Swasta
Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0	1
Taman Kanak-kanak (TK)	0	3
RA/BA	0	1
SD	2	0
MI	0	0
SMP	2	1
MTs	0	2
SMA	0	1
MA	0	2
SMK	0	0
Akademi/Perguruan Tinggi	0	0
SDLB	0	0
SMPLB	0	0
SMALB	0	0
Pondok Pesantren	0	1
Madrasah Diniyah		0
Seminari/sejenisnya		0

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan lembaga pendidikan di Kelurahan Bukit Pinang menunjukkan pola dominasi lembaga pendidikan swasta pada tingkat prasekolah dan pendidikan keagamaan, sedangkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama masih didominasi oleh sekolah negeri. Pada tingkat pendidikan anak usia dini, seluruh fasilitas PAUD, TK, dan RA/BA dikelola oleh

pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dan kontribusi masyarakat cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan usia dini, meskipun belum ditopang oleh kehadiran lembaga negeri.

Untuk pendidikan dasar, tersedia dua Sekolah Dasar (SD) negeri yang menjadi tumpuan utama masyarakat, namun absennya Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengindikasikan keterbatasan pilihan pendidikan berbasis agama Islam di jenjang dasar. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, Kelurahan Bukit Pinang cukup baik dilayani oleh dua SMP negeri dan satu SMP swasta, serta adanya dua MTs yang seluruhnya swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pada jenjang ini masyarakat memiliki pilihan antara jalur pendidikan umum maupun berbasis keagamaan.

Namun, tantangan mulai muncul pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan. Hanya terdapat satu SMA swasta, tanpa kehadiran SMA negeri maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketiadaan SMK menjadi catatan penting, karena keterampilan vokasional sangat diperlukan di era modern sebagai bekal daya saing kerja. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) yang seluruhnya dikelola swasta, tanpa ada MA negeri.

Lebih lanjut, tidak terdapat lembaga pendidikan tinggi maupun pendidikan luar biasa (SDLB, SMPLB, SMALB), yang menandakan perlunya perhatian lebih untuk kelompok disabilitas dan akses lanjutan pendidikan bagi lulusan SMA/MA di wilayah ini. Sementara itu, keberadaan satu pondok pesantren menjadi indikasi positif peran pendidikan berbasis agama Islam di luar jalur formal. Namun, ketiadaan Madrasah Diniyah dan seminari atau sejenisnya juga menjadi ruang yang masih kosong. Distribusi lembaga pendidikan di Kelurahan Bukit Pinang masih belum merata. Meskipun jenjang dasar dan menengah pertama terlayani dengan cukup baik, kebutuhan akan pengembangan jenjang lanjutan (SMA, SMK), pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi masih menjadi tantangan ke depan. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat menjalin sinergi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kelurahan Bukit Pinang.

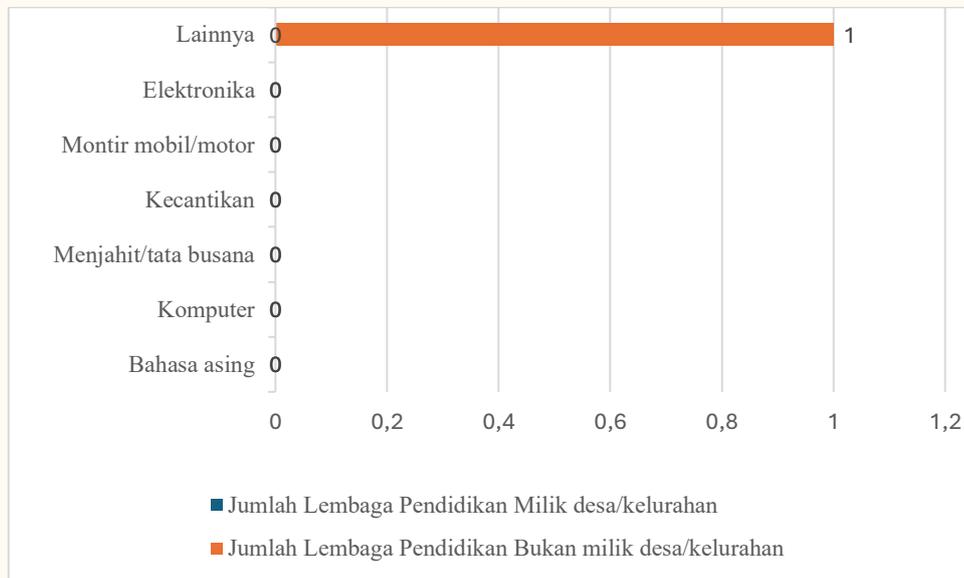
Tabel 3. 2 Kegiatan Penunjang Pendidikan

Kegiatan Penunjang pendidikan	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Kegiatan pendidikan keaksaraan dasar/lanjutan selama setahun terakhir	-	Tidak ada
Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir	-	Tidak ada
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Ada	-

Kegiatan penunjang pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, khususnya di tingkat masyarakat. Berdasarkan data dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bukit Pinang masih memiliki keterbatasan dalam penyelenggaraan program pendidikan non-formal, khususnya dalam kegiatan keaksaraan dasar, keaksaraan lanjutan, serta program kesetaraan seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Ketiadaan program-program ini mengindikasikan bahwa belum ada dukungan sistematis terhadap kelompok masyarakat yang mungkin putus sekolah, belum melek huruf, atau belum menamatkan pendidikan formalnya. Padahal, menurut kebijakan pendidikan nasional, kegiatan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari strategi untuk menekan angka buta huruf dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan. Ketidakhadiran layanan ini dapat menghambat upaya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya bagi kalangan dewasa atau pekerja informal yang membutuhkan pendidikan alternatif.

Namun demikian, terdapat satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kelurahan Bukit Pinang yang menjadi titik terang dalam penyediaan sarana literasi. Keberadaan TBM memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara informal, menyediakan akses bacaan, dan menjadi tempat edukasi nonformal yang dapat menjangkau anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. TBM juga dapat dijadikan landasan awal untuk pengembangan program pendidikan non-formal lainnya, seperti pelatihan keterampilan, literasi digital, maupun penguatan budaya membaca. Untuk ke depan, potensi TBM dapat dimaksimalkan melalui dukungan dari Dinas Perpustakaan Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi komunitas literasi. Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda dan pemangku kepentingan pendidikan perlu mendorong

pembentukan kelompok belajar masyarakat dan mengaktifkan kembali program Paket A/B/C, khususnya bagi warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dengan memperluas layanan penunjang pendidikan, tidak hanya akan meningkatkan daya literasi masyarakat, tetapi juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kelurahan Bukit Pinang.



Gambar 3. 1 Jumlah Lembaga Pendidikan Milik Desa/Kelurahan & Bukan Milik Desa/Kelurahan

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejauh ini tidak ada satupun lembaga yang menawarkan pelatihan dalam bidang bahasa asing, komputer, menjahit/tata busana, kecantikan, montir mobil/motor, maupun elektronika. Satu-satunya kegiatan pelatihan yang tercatat masuk dalam kategori “Lainnya” menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penunjang pendidikan di sektor vokasi dan keterampilan masih sangat terbatas dan belum terstruktur sesuai kebutuhan tenaga kerja lokal.

Ketiadaan lembaga pelatihan bahasa asing dan komputer mengindikasikan minimnya sarana bagi generasi muda untuk mengembangkan literasi digital dan kemampuan komunikasi global, padahal kedua kompetensi ini semakin krusial di era ekonomi kreatif dan digitalisasi. Sementara itu, tidak adanya pelatihan menjahit, kecantikan, ataupun montir mobil/motor menandakan peluang pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor usaha mikro yang sesungguhnya dapat menjadi penggerak utama perekonomian lokal belum tergarap optimal. Hanya satu program yang masuk dalam

kategori “Lainnya” menunjukkan inisiatif sangat terbatas untuk menjawab kebutuhan keterampilan khas masyarakat setempat.

Secara mendalam, kondisi ini mencerminkan beberapa tantangan: pertama, kurangnya fasilitator atau mitra penyelenggara pelatihan yang bersedia beroperasi di tingkat kelurahan; kedua, minimnya dukungan pendanaan dan sarana untuk membuka kelas-kelas kejuruan; dan ketiga, kurangnya pemetaan kebutuhan pasar kerja lokal maupun preferensi warga terhadap jenis keterampilan tertentu. Tanpa intervensi strategis seperti kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terdekat, atau dunia usaha setempat peluang peningkatan kapasitas warga untuk meraup pendapatan dari usaha mandiri akan tetap terhambat.

Oleh karena itu, pengembangan kegiatan penunjang pendidikan di bidang keterampilan praktis perlu diprioritaskan dengan mendirikan minimal satu lembaga pelatihan di masing-masing bidang misalnya kursus komputer dan bahasa Inggris untuk memperkuat soft skills, serta bengkel motor, salon, dan perajut/manjahit untuk menunjang usaha rakyat. Selain itu, program modul pelatihan singkat (blended learning) yang memanfaatkan fasilitas TBM atau ruang publik kelurahan dapat segera dirancang sebagai langkah awal, sebelum scale-up ke skema kelas berbayar atau berlisensi. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi kesenjangan keterampilan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Bukit Pinang dalam jangka panjang.

B. Kesehatan

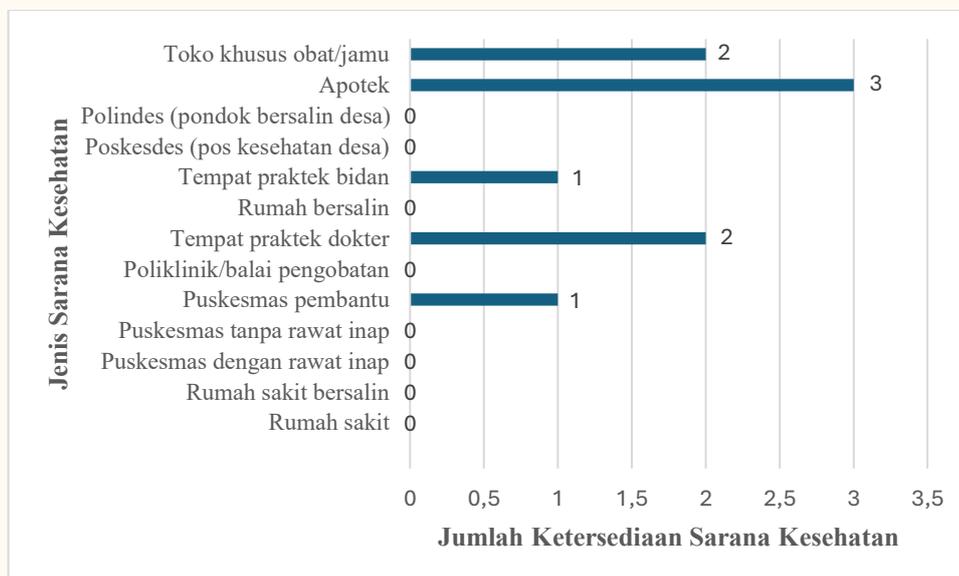
Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai serta perilaku hidup bersih dan sehat perlu mendapat perhatian dalam upaya pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Di tingkat kelurahan, sektor kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan tenaga kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, termasuk sanitasi dan gizi, turut menentukan derajat kesehatan masyarakat secara umum.

Tabel 3.3 Jumlah Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kelurahan Bukit Pinang

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
Toko khusus obat/jamu	2
Apotek	3
Polindes (pondok bersalin desa)	0
Poskesdes (pos kesehatan desa)	0
Tempat praktik bidan	1
Rumah bersalin	0
Tempat praktik dokter	2
Poliklinik/balai pengobatan	0
Puskesmas pembantu	1
Puskesmas tanpa rawat inap	0
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit bersalin	0
Rumah sakit	0



Gambar 3. 2 Jumlah Sarana Kesehatan

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana kesehatan di Kelurahan Bukit Pinang masih tergolong terbatas. Jenis sarana kesehatan yang paling banyak tersedia adalah apotek, dengan jumlah sebanyak tiga unit, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap obat-obatan cukup baik dibandingkan dengan sarana kesehatan lainnya. Selain apotek, terdapat dua unit toko khusus obat atau jamu serta dua tempat praktik dokter yang dapat menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Di samping itu, tersedia pula satu unit tempat praktik bidan

dan satu puskesmas pembantu yang berfungsi untuk menunjang pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah yang mungkin jauh dari fasilitas utama. Namun demikian, sebagian besar jenis sarana kesehatan lainnya belum tersedia, termasuk fasilitas penting seperti rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas (baik dengan maupun tanpa rawat inap), poskesdes (pos kesehatan desa), dan polindes (pondok bersalin desa). Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang masih sangat bergantung pada fasilitas kesehatan di luar wilayah kelurahan untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih komprehensif, terutama untuk kasus-kasus yang memerlukan perawatan intensif, rawat inap, atau persalinan. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar layanan kesehatan dasar di wilayah ini masih bergantung pada sektor swasta atau individu melalui praktik pribadi.

Situasi ini menjadi perhatian penting dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, karena keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan faktor vital dalam menunjang kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penambahan dan penguatan infrastruktur layanan kesehatan publik, terutama dengan mendirikan puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Selain itu, perluasan layanan kesehatan promotif dan preventif seperti posyandu dan poskesdes juga sangat diperlukan agar dapat menjangkau masyarakat di tingkat lingkungan atau RT. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sangat penting dalam mendorong penyediaan sarana kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, sehingga dapat mendukung sistem kesehatan masyarakat yang berkelanjutan di Kelurahan Bukit Pinang.

Tabel 3.4 Jumlah Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan
Rumah sakit	0
Rumah sakit bersalin	0
Puskesmas dengan rawat inap	0
Puskesmas tanpa rawat inap	0
Puskesmas pembantu	1
Poliklinik/balai pengobatan	0
Tempat praktek dokter	2
Rumah bersalin	0
Tempat praktek bidan	1

Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan
Poskesdes (pos kesehatan desa)	0
Polindes (pondok bersalin desa)	0
Apotek	3
Toko khusus obat/jamu	2

Fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat. Berikut adalah beberapa infrastruktur penting tentang Fasilitas Kesehatan:

Tabel 3. 5 Jarak Fasilitas Kesehatan Terdekat

Fasilitas Kesehatan	Jarak ke Faskes terdekat (km)
Rumah sakit	5,8
Rumah sakit bersalin	99,7
Puskesmas dengan rawat inap	14,7
Puskesmas tanpa rawat inap	5,7
Poliklinik/balai pengobatan	5,2
Rumah bersalin	19,1
Poskesdes (pos kesehatan desa)	26,0
Polindes (pondok bersalin desa)	18,6

Aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tabel 3.6 menyajikan informasi mengenai jarak antara Kelurahan Bukit Pinang dan fasilitas kesehatan terdekat. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan dengan tingkat layanan yang lebih lengkap berada dalam jarak yang cukup jauh dari wilayah kelurahan. Rumah sakit terdekat berjarak sekitar 5,8 km dari Kelurahan Bukit Pinang, sedangkan rumah sakit bersalin bahkan berada pada jarak yang sangat jauh, yakni mencapai 99,7 km. Hal ini menunjukkan minimnya ketersediaan fasilitas bersalin dengan tingkat layanan rumah sakit di kawasan sekitar, yang tentu menjadi hambatan besar khususnya bagi ibu hamil yang memerlukan pertolongan medis darurat dan persalinan aman.

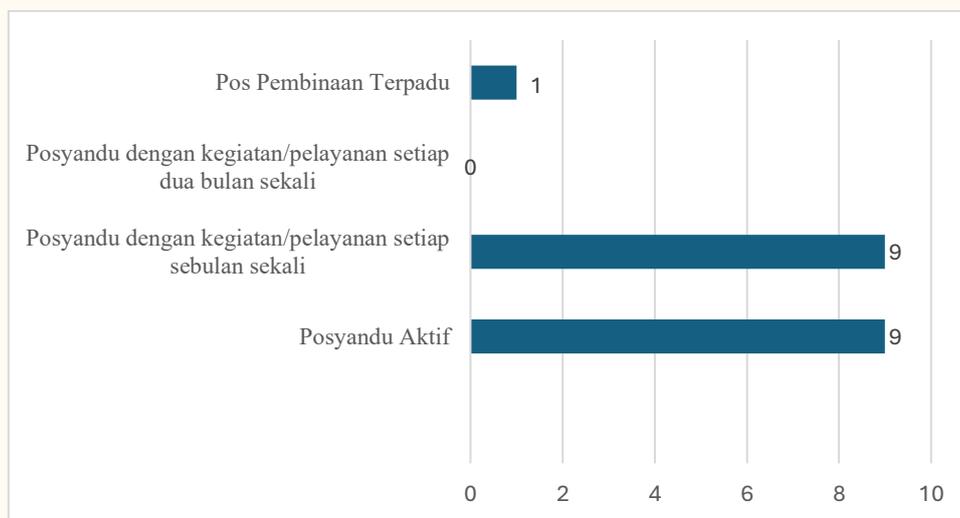
Puskesmas dengan layanan rawat inap terdekat berada pada jarak 14,7 km. Jarak ini tergolong jauh untuk akses harian, apalagi dalam keadaan darurat. Puskesmas tanpa rawat inap memang lebih dekat, yaitu sekitar 5,7 km, namun keterbatasan layanan yang disediakan menjadi catatan tersendiri. Begitu pula dengan poliklinik atau balai

pengobatan yang berjarak 5,2 km cukup dekat namun belum mampu menggantikan peran fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti puskesmas rawat inap atau rumah sakit. Beberapa fasilitas kesehatan berbasis komunitas seperti Poskesdes dan Polindes terindikasi sangat jauh dari jangkauan, dengan jarak masing-masing 26 km dan 18,6 km. Rumah bersalin juga berada pada jarak cukup jauh, yaitu 19,1 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa fasilitas kesehatan dasar di sekitar wilayah Kelurahan Bukit Pinang, namun layanan kesehatan berbasis komunitas yang biasanya lebih mudah diakses oleh masyarakat di tingkat RT atau RW belum terdistribusi secara merata di kawasan ini.

Jarak yang jauh dari berbagai fasilitas kesehatan tersebut mengindikasikan masih terbatasnya cakupan infrastruktur kesehatan yang memadai di sekitar Kelurahan Bukit Pinang. Dampaknya dapat dirasakan dalam bentuk keterlambatan penanganan medis, terutama dalam situasi kegawatdaruratan, serta terbatasnya layanan pencegahan dan pengobatan penyakit secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan kualitas kesehatan masyarakat jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan pembangunan fasilitas kesehatan baru atau penguatan sistem rujukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses terhadap fasilitas kesehatan dengan cara memperpendek jarak tempuh melalui pembangunan fasilitas baru, terutama puskesmas rawat inap dan rumah bersalin, serta meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan berbasis komunitas seperti Poskesdes dan Polindes. Peningkatan sarana transportasi umum serta kampanye literasi kesehatan juga menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, akses yang memadai terhadap fasilitas umum, khususnya kesehatan, akan menjadi penopang utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan sejahtera di Kelurahan Bukit Pinang.

Tabel 3.6 Kemudahan Mencapai Fasilitas Kesehatan Terdekat

Fasilitas Kesehatan	Kemudahan untuk Mencapai Faskes terdekat
Rumah sakit	Sangat mudah
Rumah sakit bersalin	Sulit
Puskesmas dengan rawat inap	Sangat mudah
Puskesmas tanpa rawat inap	Sangat mudah
Poliklinik/balai pengobatan	Sangat mudah
Rumah bersalin	Mudah
Poskesdes (pos kesehatan desa)	Mudah
Polindes (pondok bersalin desa)	Sulit

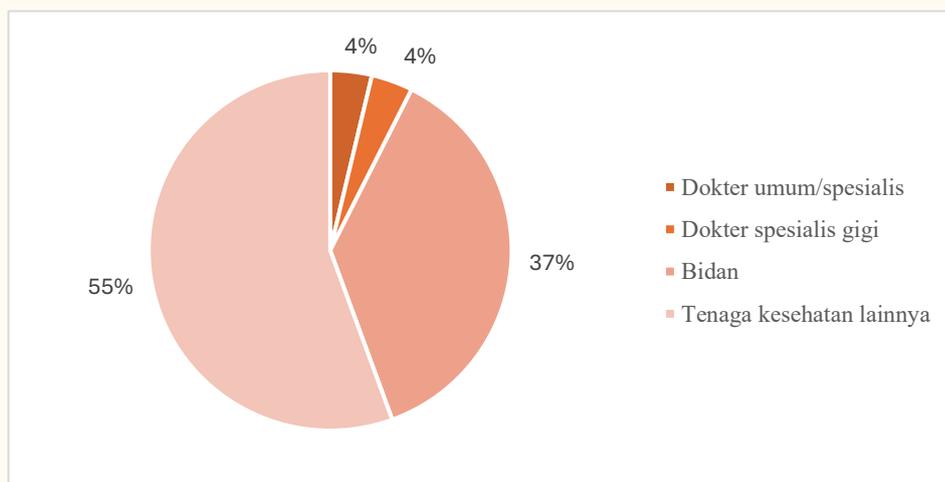


Gambar 3.3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Grafik di atas menunjukkan gambaran aktivitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang, khususnya melalui keberadaan Posyandu dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Data ini mengindikasikan bahwa terdapat 9 Posyandu aktif yang secara konsisten menjalankan kegiatan dan pelayanan setiap sebulan sekali, namun tidak ada Posyandu yang melaksanakan kegiatan secara dua bulan sekali. Jumlah Posyandu aktif ini dapat dikategorikan cukup baik dan menjadi indikator bahwa aktivitas pelayanan kesehatan dasar bagi balita dan ibu hamil masih berjalan secara rutin. Frekuensi kegiatan bulanan juga memperlihatkan komitmen kader kesehatan dan dukungan masyarakat lokal terhadap upaya pemeliharaan kesehatan preventif. Posyandu memiliki peran penting dalam pemberian imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, keberadaan

dan keberlanjutan 9 posyandu aktif tersebut merupakan modal sosial yang kuat dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dari bawah.

Namun demikian, meskipun keberadaan Posyandu cukup memadai, grafik juga menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 unit Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di wilayah ini. Posbindu biasanya berfokus pada pelayanan pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, serta penyuluhan gaya hidup sehat bagi masyarakat usia produktif dan lansia. Jumlah yang sangat minim ini menandakan bahwa aspek pelayanan kesehatan preventif untuk kelompok usia dewasa dan lansia belum menjadi fokus prioritas atau masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi SDM, dukungan kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Ketiadaan Posyandu yang beroperasi secara dua bulan sekali juga bisa diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa seluruh Posyandu yang aktif sudah terjadwal dalam siklus bulanan, atau justru mengindikasikan belum optimalnya keberagaman jadwal pelayanan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda-beda.



Gambar 3. 4 Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tinggal/Menetap di Desa/Kelurahan

Grafik di atas menunjukkan bahwa tenaga kesehatan lainnya mendominasi proporsi keseluruhan, yakni sebanyak 15 orang atau 55% dari total tenaga kesehatan yang ada. Kategori ini biasanya mencakup profesi seperti perawat, asisten apoteker, tenaga gizi, sanitarian, atau tenaga promosi kesehatan, yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dan preventif. Posisi kedua diisi oleh bidan, sebanyak 10 orang atau 37%. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas layanan kesehatan masyarakat di wilayah ini. Peran bidan

sangat penting dalam mendampingi ibu hamil, melahirkan, serta memberikan edukasi terkait perawatan bayi dan balita. Proporsi tenaga medis dari kalangan dokter umum/spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter lainnya sangat minim. Dokter umum/spesialis hanya sebanyak 1 orang atau 4%, begitu juga dengan dokter spesialis gigi sebanyak 1 orang (4%), dan bidan tambahan lainnya sebanyak 1 orang (4%). Minimnya tenaga medis profesional seperti dokter dan dokter gigi menunjukkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan lanjutan dan diagnostik klinis di wilayah ini.

Tabel 3.7 Jenis KLB/Wabah Penyakit

Jenis KLB/Wabah Penyakit	Kejadian	
	Ada	Tidak ada
Muntaber/diare	-	Tidak ada
Demam berdarah	-	Tidak ada
Campak	-	Tidak ada
Malaria	-	Tidak ada
Flu burung/SARS	-	Tidak ada
Hepatitis E	-	Tidak ada
Difteri	-	Tidak ada
Corona/COVID 19	-	Tidak ada
Lainnya	-	Tidak ada
Kerawanan Pangan	-	Tidak ada

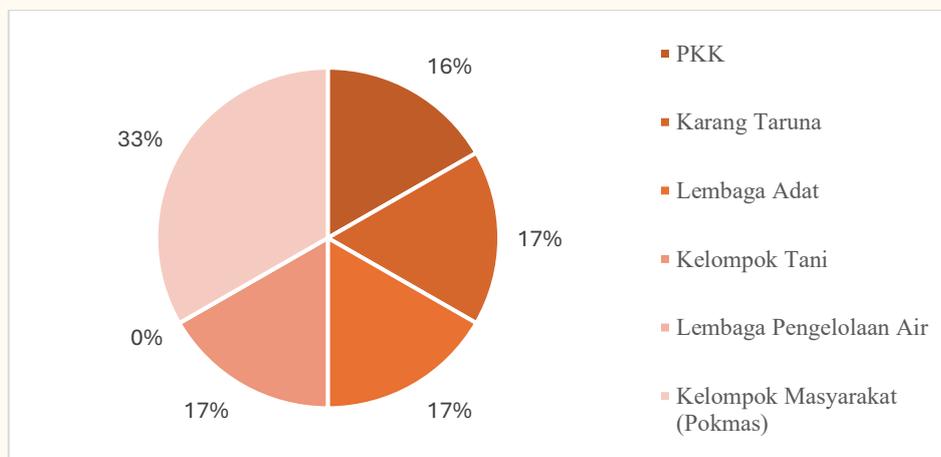
Berdasarkan data yang ditampilkan, seluruh jenis penyakit tersebut tercatat tidak pernah terjadi dalam bentuk KLB di Kelurahan Bukit Pinang. Kolom “Ada” tidak menunjukkan tanda keterjadian sama sekali, sementara seluruh entri berada di kolom “Tidak Ada”. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini relatif aman dari wabah penyakit yang bersifat masif atau berpotensi menimbulkan krisis kesehatan masyarakat.

Tabel 3. 8 Jumlah Penyandang Disabilitas

Jenis disabilitas	Banyaknya penyandang disabilitas
Tuna netra (buta)	0
Tuna rungu (tuli)	0
Tuna wicara (bisu)	0
Tuna rungu-wicara (tuli-bisu)	1
Tuna daksa (disabilitas tubuh) : kelumpuhan/kelainan/ketidakkangk apan anggota gerak	0

Jenis disabilitas	Banyaknya penyandang disabilitas
Tuna grahita (keterbelakangan mental)	0
Tuna laras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)	0
Tuna eks-sakit kusta: pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter	0
Tuna ganda (fisik-mental): fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau tubuh) dan mental (tunagrahita dan tunalaras)	11

Dari data yang tercantum, terdapat satu orang penyandang tuna rungu-wicara (tuli-bisu) dan sebelas orang penyandang disabilitas ganda, yaitu individu yang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas (baik fisik maupun mental). Sementara itu, untuk jenis disabilitas lainnya tercatat tidak ada penyandang pada saat data ini dikumpulkan.



Gambar 3.5 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

Kelompok Masyarakat (Pokmas): 2 lembaga (33% dari total), PKK: 1 lembaga (16%), Karang Taruna: 1 lembaga (17%), Kelompok Tani: 1 lembaga (17%), Lembaga Adat: 1 lembaga (17%), Lembaga Pengelola Air: 0 lembaga (0%). Dari data tersebut terlihat bahwa Kelompok Masyarakat (Pokmas) merupakan jenis lembaga yang paling banyak jumlahnya, sementara lembaga lainnya memiliki jumlah yang sama, yaitu satu. Tidak terdapat lembaga pengelola air di wilayah ini. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial masih aktif dan berjalan, meskipun ada beberapa aspek yang bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti pembentukan lembaga yang menangani pengelolaan air.



SOSIAL BUDAYA

SOSIAL BUDAYA

Keberagaman agama merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kondisi sosial dan budaya suatu wilayah. Di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan bermasyarakat diwarnai oleh pluralitas keyakinan yang menjadi kekayaan identitas bangsa. Hal ini juga tercermin di tingkat lokal, termasuk di wilayah Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Keberadaan berbagai pemeluk agama yang hidup berdampingan dengan damai menunjukkan adanya tingkat toleransi dan interaksi sosial yang sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam pelaksanaan hari besar keagamaan, warga Kelurahan Bukit Pinang kerap terlibat dalam bentuk dukungan dan penghormatan lintas iman. Fenomena ini mencerminkan karakter masyarakat perkotaan di Kalimantan Timur yang inklusif, terbuka, dan menghargai keberagaman.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama, disajikan data estimasi proporsi keagamaan yang mengacu pada data Kecamatan Samarinda Ulu sebagai basis perhitungan. Data ini penting sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan sosial, pembangunan fasilitas keagamaan, serta dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial antarumat beragama di wilayah Kelurahan Bukit Pinang.

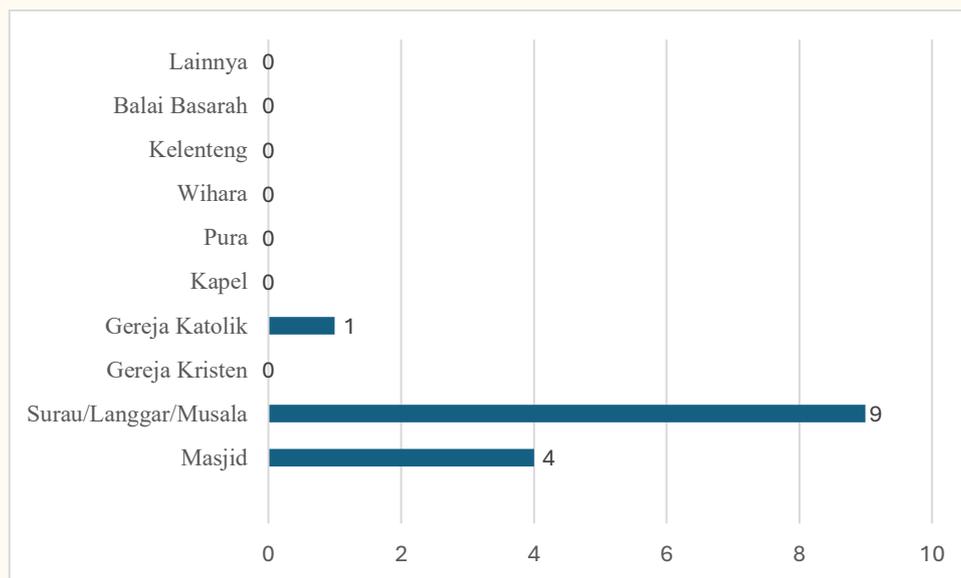
Tabel 4.1 Agama/Kepercayaan Penduduk

Agama/Kepercayaan	Proporsi Kecamatan (%)	Estimasi Jumlah Penduduk di Bukit Pinang
Islam	91,21 %	± 11 091 jiwa
Kristen Protestan	4,61 %	± 561 jiwa
Katolik	3,42 %	± 416 jiwa
Buddha	0,15 %	± 18 jiwa
Hindu	0,13 %	± 16 jiwa
Total	100 %	12 102 jiwa (sisa bulatan)

Kelurahan Bukit Pinang merupakan salah satu wilayah di Kota Samarinda yang mencerminkan keberagaman sosial dan agama yang khas di perkotaan Kalimantan Timur. Berdasarkan estimasi distribusi penduduk menurut agama yang mengacu pada proporsi keagamaan di Kecamatan Samarinda Ulu, dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Bukit Pinang didominasi oleh pemeluk agama Islam yang mencapai sekitar 91,21% atau sekitar 11.091 jiwa dari total populasi ±12.160 jiwa. Dominasi jumlah pemeluk agama Islam ini sejalan dengan karakteristik sosial mayoritas masyarakat di Kota Samarinda maupun

Kalimantan Timur secara umum, yang memiliki akar budaya dan nilai-nilai kehidupan yang kuat dalam ajaran Islam. Selain itu, terdapat pula keberagaman pemeluk agama lainnya yang hidup berdampingan dalam suasana harmonis. Tercatat bahwa sekitar 561 jiwa (4,61%) menganut agama Kristen Protestan dan 416 jiwa (3,42%) menganut agama Katolik. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 8% populasi merupakan bagian dari komunitas Kristiani, yang turut berkontribusi dalam dinamika kehidupan sosial, pendidikan, dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah tersebut.

Selanjutnya, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, pemeluk agama Buddha (± 18 jiwa atau 0,15%) dan Hindu (± 16 jiwa atau 0,13%) juga terdapat di Kelurahan Bukit Pinang. Keberadaan mereka menandakan adanya akulturasi budaya yang cukup beragam, serta pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak beragama dalam kerangka kehidupan bermasyarakat yang inklusif. Menariknya, tidak terdapat penganut agama Konghucu maupun aliran penghayat kepercayaan berdasarkan catatan administratif kelurahan. Hal ini bisa mencerminkan keterbatasan populasi dari kelompok tersebut atau kecenderungan identitas religius mereka tercatat dalam kategori agama mayoritas, sesuai dengan sistem pencatatan nasional.



Gambar 4. 1 Jumlah Tempat Ibadah

Mayoritas penduduk menganut agama Islam, yang terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan di masjid dan mushalla yang tersebar di berbagai lingkungan RT. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga pendidikan agama melalui TPA/TPQ menjadi bagian dari rutinitas sosial masyarakat. Sementara itu, pemeluk agama

Kristen dan Katolik juga secara aktif menjalankan kegiatan ibadah di gereja-gereja yang ada di sekitar wilayah kelurahan maupun yang terletak di kelurahan terdekat.



OLAHRAGA DAN HIBURAN

OLAHRAGA DAN HIBURAN

Kelurahan Bukit Pinang menunjukkan potensi signifikan dalam bidang olahraga dan hiburan yang dapat menjadi pendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan sosial yang inklusif dan partisipatif. Aktivitas olahraga di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kebugaran jasmani, tetapi juga memainkan peran penting sebagai media interaksi sosial antarwarga, pembentukan karakter yang positif, serta sebagai wadah pengembangan minat dan bakat generasi muda. Masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan fisik yang diselenggarakan di ruang-ruang terbuka dan fasilitas sederhana yang tersedia, seperti lapangan voli, lapangan sepak bola, dan gedung serbaguna. Gedung serbaguna tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan sosial, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat kegiatan olahraga bersama yang mendorong solidaritas dan kebersamaan.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga tampak dari rutinitas senam pagi yang dilakukan bersama, turnamen antar-RT yang berlangsung secara berkala, hingga kegiatan latihan bela diri yang difokuskan pada kelompok anak dan remaja. Tingginya antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut mengindikasikan bahwa olahraga telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Bukit Pinang. Meskipun demikian, sarana dan prasarana olahraga yang tersedia masih tergolong terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera direspons oleh pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur olahraga yang lebih representatif dan program pembinaan yang berkelanjutan.

Dengan memperkuat infrastruktur olahraga serta mendukung inisiatif masyarakat yang telah terbentuk secara organik, Kelurahan Bukit Pinang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan olahraga komunitas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan sosial, mendorong prestasi olahraga lokal, serta menumbuhkan nilai-nilai kedisiplinan, sportivitas, dan kerjasama lintas usia maupun latar belakang sosial. Upaya ini sejalan dengan semangat pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam menciptakan lingkungan sehat, aktif, dan produktif.

Tabel 5.1 Jumlah Fasilitas Olahraga

Fasilitas Olahraga	Banyaknya Fasilitas olahraga			
	Ada, baik	Ada, rusak sedang	Ada, rusak parah	tidak ada
Sepak bola	-	-	-	v
Bola voli	v	-	-	-
Bulu tangkis	v	-	-	-
Bola basket	-	-	-	v
Tenis lapangan	-	-	-	v
Tenis meja	v	-	-	-
Futsal	v	-	-	-
Renang	v	-	-	-
Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	v	-	-	-
Bilyard	-	-	-	v
Fitnes, Aerobik, dll	v	-	-	-
Lainnya	-	-	-	v

Berikut keterangan dari fasilitas yang ada di Kelurahan Bukit Pinang:

Tabel 5.2 Keberadaan Kelompok Kegiatan Olahraga

Kelompok kegiatan	Keberadaan	
	Ada	Tidak ada
Sepak bola	-	Tidak ada
Bola voli	Ada	-
Bulu tangkis	Ada	-
Bola basket	-	Tidak ada
Tenis lapangan	-	Tidak ada
Tenis meja	Ada	-
Futsal	Ada	-
Renang	-	Tidak ada
Bela diri (pencak silat, karate, dll)	Ada	-
Bilyard	-	Tidak ada
Fitnes, Aerobik, dll		Tidak ada

Tabel "Kelompok Kegiatan" menyajikan informasi mengenai keberadaan berbagai jenis kegiatan olahraga. Observasi menunjukkan bahwa sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan bela diri (pencak silat, karate, dll) secara positif terkonfirmasi "Ada" di desa tersebut. Keberadaan beragam aktivitas ini mengindikasikan tingkat partisipasi masyarakat

yang cukup baik dalam kegiatan fisik, serta kemungkinan adanya fasilitas pendukung atau komunitas olahraga yang aktif. Ini merupakan aset penting bagi kesehatan masyarakat dan potensi pengembangan olahraga rekreasi maupun prestasi di tingkat lokal.

Sebaliknya, kegiatan seperti bola basket, tenis lapangan, renang, bilyard, dan fitnes/aerobik dilaporkan "Tidak Ada." Ketiadaan fasilitas atau inisiatif untuk cabang olahraga ini menunjukkan adanya celah dalam diversifikasi kegiatan fisik. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai keterbatasan sarana prasarana, kurangnya minat masyarakat pada jenis olahraga tersebut, atau belum adanya fasilitator/pelatih yang memadai. Kondisi ini dapat mempengaruhi opsi masyarakat dalam berolahraga dan berpotensi menghambat perkembangan potensi atletik pada cabang-cabang tersebut.

Secara keseluruhan, desa memiliki basis yang kuat dalam olahraga populer seperti sepak bola, voli, dan bulu tangkis, namun terdapat kebutuhan untuk pengembangan dan penyediaan fasilitas bagi cabang olahraga lain guna meningkatkan pilihan aktivitas fisik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 5.3 Banyaknya Fasilitas Olahraga

Fasilitas Olahraga	Banyaknya Fasilitas Olahraga			
	Ada, baik	Ada, rusak sedang	Ada, rusak parah	tidak ada
Sepak bola	-	-	-	v
Bola voli	v	-	-	-
Bulu tangkis	v	-	-	-
Bola basket	-	-	-	v
Tenis lapangan	-	-	-	v
Tenis meja	v	-	-	-
Futsal	v	-	-	-
Renang	v	-	-	-
Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	v	-	-	-
Bilyard	-	-	-	v
fitnes, aerobik, dll	v	-	-	-
Lainnya	-	-	-	v

Berdasarkan tabel yang ditampilkan mengenai fasilitas olahraga di Kelurahan Bukit Pinang, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana olahraga di wilayah ini masih tergolong terbatas. Beberapa jenis olahraga memiliki fasilitas yang baik dan dapat digunakan dengan

optimal, seperti tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dan sejenisnya), serta fitness/aerobik, yang seluruhnya berada dalam kondisi baik.

Namun, sejumlah cabang olahraga lainnya justru tidak memiliki fasilitas sama sekali, seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis lapangan, dan bola basket. Hal ini menunjukkan belum meratanya pengadaan sarana olahraga yang dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat, terutama bagi pemuda dan pelajar di wilayah tersebut.

Sementara itu, terdapat satu fasilitas yang tersedia namun mengalami kerusakan, yaitu biliar, yang dalam kondisi rusak parah, serta satu lainnya dalam kategori “lainnya” juga masuk dalam kondisi rusak parah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk menyediakan fasilitas olahraga, pemeliharaan dan pemerataan pembangunan fasilitas masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah maupun pihak terkait dalam pengembangan dan perbaikan fasilitas olahraga demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung gaya hidup sehat di Kelurahan Bukit Pinang.



ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI



ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

Angkutan merupakan komponen krusial dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara efisien, aman, dan tepat waktu. Dalam konteks pembangunan wilayah dan perencanaan tata ruang, angkutan tidak hanya dipahami sebagai sarana fisik (seperti kendaraan), tetapi juga mencakup infrastruktur pendukung, pola jaringan pergerakan, serta sistem layanan yang terorganisir. Fungsi angkutan sangat vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik, karena menentukan tingkat keterhubungan antarwilayah dan antarindividu. Keberadaan sistem angkutan yang memadai memungkinkan terjadinya mobilitas yang lebih inklusif dan merata, memperkecil ketimpangan akses, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis, ketersediaan, dan efektivitas angkutan sangat penting dalam analisis kebijakan transportasi lokal maupun regional. Dari keterangan akan diberikan keterangan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Angkutan Umum yang Melewati Kelurahan/Desa

Angkutan umum yg melewati desa/kelurahan	Keberadaan	
	Ada	Tidak Ada
Dengan trayek tetap	-	Tidak Ada
Tanpa trayek tetap	Ada	-

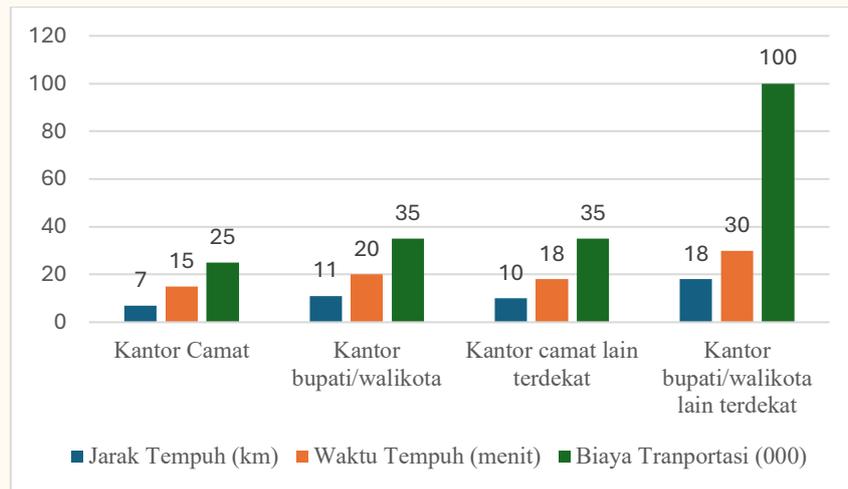
Sarana transportasi adalah fasilitas atau infrastruktur yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah beberapa sarana transportasi yang ada: Berdasarkan Tabel 6.1, angkutan umum dengan trayek tetap "Tidak Ada" di desa, yang berarti tidak ada bus atau angkot dengan rute dan jadwal reguler. Hal ini menyebabkan keterbatasan aksesibilitas dan mobilitas warga. Namun, angkutan umum "Tanpa trayek tetap" seperti ojek atau sewaan "Ada," menunjukkan adanya solusi transportasi informal yang fleksibel namun tidak terstruktur. Kesimpulannya, Kelurahan Bukit Pinang menghadapi tantangan dalam transportasi publik formal, sehingga mobilitas sangat bergantung pada moda tidak resmi yang mungkin lebih mahal dan kurang terprediksi.

Tabel 6. 2 Sarana Transportasi Umum Yang Biasa Digunakan

Sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor lurah ke	Jenis Angkutan Umum yang biasa digunakan				
	Ojek sepeda motor	Kendaraan bermotor roda 2 atau lebih	Perahu	Pesawat terbang	Lainnya
Kantor Camat	v	v	-	-	-
Kantor bupati/walikota	v	v	-	-	-
Kantor camat lain terdekat	v	v	-	-	-
Kantor bupati/walikota lain terdekat	v	v	-	-	-

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Bukit Pinang tidak dilintasi oleh angkutan umum dengan trayek tetap, namun masih terdapat moda transportasi umum tanpa trayek tetap, seperti ojek dan kendaraan bermotor pribadi maupun sewaan yang berfungsi sebagai moda utama pergerakan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk sangat bergantung pada sistem transportasi informal yang fleksibel namun kurang sistematis. Hal ini berdampak langsung pada keterjangkauan antarlokasi, khususnya bagi penduduk yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap ojek sebagai moda transportasi utama.

Mayoritas penduduk menggunakan ojek sepeda motor dan kendaraan bermotor roda dua atau lebih untuk menjangkau kantor kecamatan, kantor wali kota/bupati, maupun kantor pemerintahan lain terdekat. Tidak adanya moda transportasi air atau udara mengindikasikan bahwa sarana mobilitas masyarakat masih terbatas pada jalur darat, yang berarti kualitas dan konektivitas jalan memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas mobilitas sehari-hari. Jarak dan waktu tempuh dari kantor kelurahan ke lokasi-lokasi strategis lain juga menentukan keterjangkauan layanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran atau dengan akses jalan yang kurang memadai. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang dan transportasi lokal, mengingat kemudahan akses merupakan faktor kunci dalam pemerataan pelayanan dasar dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi.



Gambar 5. 1 Jarak Waktu Tempuh dari Kantor Lurah

Sarana media adalah alat atau platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, atau hiburan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa sarana media:

Tabel 6. 3 Sarana Media

No	Program/Siaran TV/Radio	Keberadaan	
		Ya	Tidak
1	TVRI	Ya	-
2	TVRI daerah	Ya	-
3	TV Swasta	Ya	-
4	TV Luar Negeri	Ya	-
5	RRI	Ya	-
6	RRI Daerah	Ya	-
7	Radio Swasta/komunitas	Ya	-

Dari segi media informasi masyarakat Kelurahan Bukit Pinang memiliki akses yang cukup luas terhadap berbagai saluran penyebaran informasi, baik dari televisi nasional seperti TVRI dan TVRI daerah, saluran TV swasta dan luar negeri, maupun siaran radio seperti RRI dan radio komunitas. Keberadaan media ini menjadi aset penting dalam mendukung arus informasi dan edukasi masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi tentang transportasi publik, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Dengan demikian, sinergi antara sarana transportasi dan media informasi menjadi dua pilar penting yang mempengaruhi keterhubungan warga terhadap layanan publik dan pembangunan wilayah secara umum.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, perlu adanya intervensi kebijakan berupa penyediaan angkutan umum dengan trayek tetap dan penguatan

sistem transportasi terintegrasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah yang masih minim akses. Penambahan dan perbaikan jalan, pembangunan halte, serta penyuluhan keselamatan berkendara juga harus disertai dengan penguatan peran media lokal dalam menginformasikan aksesibilitas dan hak-hak warga terhadap mobilitas yang adil dan efisien. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, diharapkan mobilitas penduduk di Kelurahan Bukit Pinang semakin lancar dan terjamin, sehingga membuka peluang lebih besar bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.



EKONOMI

EKONOMI

Kelurahan Bukit Pinang dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor informal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi sepanjang Jalan P. Suryanata dan di sekitar pusat permukiman warga. Mayoritas penduduk menggantungkan penghasilan mereka dari dagang kecil, kios rumahan, kuliner, maupun jasa informal yang berjalan secara mandiri dan berskala rumahan. Dalam konteks ini, kebijakan lokal diarahkan pada upaya pemberdayaan UMKM serta pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan dan kota.

Pemerintah Kota Samarinda, melalui DPRD dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), mendorong digitalisasi UMKM sebagai jembatan menuju ekonomi kreatif modern; ini termasuk upaya pendaftaran merek, akses pasar digital, pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, serta penerbitan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mendukung industri kreatif lokal. Upaya ini relevan untuk mendukung pelaku usaha di Bukit Pinang agar mampu memasarkan produknya lebih luas, meningkatkan kualitas produk lokal seperti kerajinan, kuliner khas, atau inovasi kreatif lainnya.

Usulan pendirian sentra UMKM di setiap kelurahan, termasuk Bukit Pinang, juga diajukan sebagai strategi untuk memperkuat jaringan pelaku ekonomi lokal, memperluas akses pasar, dan memperkuat kolaborasi antar pelaku usaha setempat. Sentra ini diharapkan menjadi titik temu bagi pengembangan usaha, pembinaan manajemen, serta pemasaran bersama meningkatkan daya saing UMKM yang selama ini berjalan sendiri tanpa dukungan struktural.

Fenomena ini juga sejalan dengan motif ekonomi masyarakat lokal yang cenderung bertahan di kategori UMKM karena fleksibilitas usaha, risiko pajak yang lebih rendah, serta modal operasional yang minim. Ironisnya, sikap bertahan ini tanpa disertai upaya skala naik dapat menghambat pertumbuhan usaha dan keterlibatan dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar. Namun, jika difasilitasi dengan pelatihan digital, akses pembiayaan, dan dukungan legalitas lewat pendampingan KPP serta pemanfaatan platform digital, pelaku UMKM Bukit Pinang memiliki peluang nyata untuk berkembang menjadi pemain ekonomi kreatif yang tangguh. Dominasi sektor informal menjadi realitas nyata di Kelurahan Bukit Pinang, namun juga membuka peluang besar bagi program pemberdayaan UMKM dan kreativitas lokal. Dengan sinergi antara pemangku kebijakan, institusi lokal, dan komunitas, strategi ekonomi

Potensi Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu

kreatif berbasis digital serta pembentukan sentra UMKM lokal dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Bukit Pinang dan Kota Samarinda pada umumnya. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat, seperti bank, asuransi, dan investasi. Berikut adalah beberapa lembaga keuangan:

Tabel 7. 1 Beberapa Lembaga Keuangan

No	Bank Umum	Jumlah
1	Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, MANDIRI, BPD, BTN)	2
2	Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll)	0
3	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	0

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat dua entitas Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, MANDIRI, BPD, BTN) yang beroperasi, sementara Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak teridentifikasi keberadaannya (jumlahnya nol). Implikasi dari temuan ini adalah bahwa aksesibilitas terhadap layanan perbankan formal, khususnya yang dikelola pemerintah, cukup memadai. Keberadaan bank-bank pemerintah ini dapat menjadi katalisator bagi berbagai inisiatif pembangunan ekonomi lokal, seperti penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), fasilitasi transaksi keuangan, serta dukungan terhadap program-program pemerintah yang berbasis komunitas. Meskipun demikian, ketiadaan bank swasta dan BPR mengindikasikan bahwa diversifikasi layanan keuangan mungkin masih terbatas, yang berpotensi membatasi opsi pembiayaan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan skema kredit yang lebih fleksibel atau spesifik.

Tabel 7. 2 Ketersediaan Agen Bahan Bakar Gas dan Minyak Tanah

No	Pangkalan/Agen/Penjual	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Minyak Tanah	Ada	-
2	LPG	Ada	-

Berdasarkan data yang disajikan, baik Minyak Tanah maupun LPG terkonfirmasi "Ada" di Kelurahan Bukit Pinang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dan sektor ekonomi di Kelurahan tersebut memiliki akses terhadap kedua sumber energi ini. Keberadaan pangkalan atau agen yang menjual minyak tanah mengindikasikan bahwa pasokan untuk kebutuhan

memasak, penerangan, atau penggunaan lain yang masih mengandalkan minyak tanah tersedia. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan minyak tanah secara umum telah mengalami penurunan seiring dengan peningkatan penggunaan LPG di banyak daerah.

Tabel 7. 3 Infrastruktur Ekonomi

No	Infrastruktur Ekonomi	Jumlah
1	Pasar dengan Bangunan Permanen	1
2	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	0
3	Pasar tanpa Bangunan	2
4	Minimarket/Swalayan/Supermarket	4
5	Restoran/Rumah Makan	0
6	Warung /Kedai Makanan minuman	50
7	Hotel	0
8	Penginapan	2
9	Toko/warung kelontong	50

Berdasarkan data pada komponen Infrastruktur ekonomi di Kelurahan Bukit Pinang, dapat diketahui bahwa aktivitas ekonomi masyarakat didukung oleh beragam jenis sarana perdagangan dan jasa, meskipun dengan tingkat persebaran yang belum sepenuhnya merata. Bangunan ekonomi yang paling dominan ditemukan di wilayah ini adalah warung atau kedai makanan dan minuman, serta toko atau warung kelontong, masing-masing berjumlah 50 unit. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan informal dan usaha mikro menjadi tulang punggung utama aktivitas ekonomi lokal, serta menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional dengan bangunan permanen hanya tercatat sebanyak satu unit, sedangkan pasar dengan bangunan semi permanen tidak ditemukan sama sekali. Adapun pasar tanpa bangunan tercatat sebanyak dua unit, yang mengindikasikan adanya kegiatan jual beli yang masih bersifat terbuka dan belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Minimarket atau swalayan/supermarket teridentifikasi berjumlah empat unit, yang mencerminkan mulai tumbuhnya pola konsumsi modern di tengah masyarakat.

Sementara itu, sektor jasa akomodasi masih tergolong minim, dengan dua unit penginapan dan tidak terdapat hotel di wilayah ini. Ketiadaan restoran atau rumah makan juga

menunjukkan bahwa usaha kuliner skala besar belum berkembang secara signifikan di Kelurahan Bukit Pinang, dan masyarakat cenderung lebih mengandalkan warung kecil untuk konsumsi harian.

Secara umum, struktur bangunan ekonomi di Kelurahan Bukit Pinang mencerminkan karakter ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah (UKM), dengan dominasi sektor informal dan perdagangan skala mikro. Kondisi ini membuka peluang bagi pengembangan usaha lokal melalui peningkatan kapasitas, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan infrastruktur ekonomi demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



KEAMANAN

KEAMANAN

Situasi keamanan di Kelurahan Bukit Pinang menunjukkan kondisi yang relatif kondusif dan aman bagi masyarakat. Berdasarkan Tabel 8.1, dari sebelas jenis tindak kejahatan yang diamati, hanya pencurian yang tercatat pernah terjadi di wilayah ini. Tidak adanya laporan terkait tindak kriminal lainnya seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian massal, penyalahgunaan narkoba, penipuan, penganiayaan, hingga tindak kriminal berat seperti pembunuhan, korupsi, dan perdagangan orang, mengindikasikan bahwa tingkat kriminalitas di Kelurahan Bukit Pinang berada pada tingkat yang sangat rendah.

Tabel 8. 1 Tindak Kejahatan

No	Tindak Kejahatan	Kejadian	
		Ada	Tidak Ada
1	Perkelahian massal	-	Tidak Ada
2	Pencurian	Ada	-
3	Pencurian dengan kekerasan	-	Tidak Ada
4	Penipuan/penggelapan	-	Tidak Ada
5	Penganiayaan	-	Tidak Ada
6	Pembakaran/Pemeriksaan/kejahatan terhadap kesusilaan	-	Tidak Ada
7	Penyalahgunaan/pengedaran narkoba	-	Tidak Ada
8	Perjudian	-	Tidak Ada
9	Pembunuhan	-	Tidak Ada
10	Perdagangan orang	-	Tidak Ada
11	Korupsi		Tidak Ada

Rendahnya angka kriminalitas tersebut tidak terlepas dari adanya fasilitas dan penguatan sistem keamanan lingkungan yang berjalan cukup efektif di wilayah ini (Tabel 8.2). Keberadaan pos keamanan lingkungan, pembentukan regu keamanan, serta penambahan anggota hansip/Linmas menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan kawasan. Selain itu, budaya pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam serta inisiatif warga dalam mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) menunjukkan bahwa masyarakat di Bukit Pinang memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dalam menjaga stabilitas sosial.

Tabel 8. 2 Fasilitas Keamanan Lingkungan

No	Penguatan Keamanan Lingkungan	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Pengembangan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan	Ada	-
2	Pembentukan/pengaturan regu keamanan	Ada	-
3	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	Ada	-
4	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan	Ada	-
5	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga	Ada	-

Hal ini diperkuat dengan data pada Tabel 8.3, yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan lokasi-lokasi rawan sosial seperti tempat mangkal anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau pekerja seks komersial. Ketiadaan kawasan-kawasan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial mencerminkan bahwa pengelolaan wilayah di Bukit Pinang cukup tertib dan berhasil mencegah terbentuknya area-area marginal yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tabel 8. 3 Kerawanan Sosial dan Ketertiban Umum

No	Kerawanan Sosial dan Ketertiban Umum	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan	-	Tidak Ada
2	Tempat mangkal gelandangan/ pengemis	-	Tidak Ada
3	Lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK)	-	Tidak Ada

Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai hasil dari kombinasi beberapa faktor, yakni:

1. Tingkat partisipasi warga yang tinggi dalam pengawasan lingkungan,
2. Keberadaan sistem pengamanan berbasis masyarakat,
3. Kultur sosial yang cenderung guyub, serta
4. Akses informasi yang cukup melalui media, sebagaimana didukung oleh data sebelumnya tentang keberadaan berbagai saluran media seperti TVRI, RRI, hingga radio komunitas.

Namun demikian, adanya kasus pencurian menandakan bahwa potensi gangguan keamanan tetap ada, terutama terkait kriminalitas konvensional dengan motif ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengamanan lingkungan tetap menjadi prioritas, khususnya dalam hal pelatihan kewaspadaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi sederhana seperti kamera CCTV komunitas atau aplikasi pelaporan warga berbasis digital. Hubungan erat antara keamanan dan kondisi sosial-ekonomi juga patut diperhatikan. Dalam konteks Kelurahan Bukit Pinang, strategi pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan pengembangan sektor informal yang sedang didorong oleh pemerintah kota secara tidak langsung dapat berdampak positif dalam menurunkan potensi kriminalitas. Dengan kata lain, keamanan wilayah tidak hanya ditopang oleh fasilitas fisik dan sistem keamanan formal, tetapi juga oleh terjaminnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Kelurahan Bukit Pinang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang relatif aman dan stabil secara sosial. Penguatan sistem keamanan partisipatif yang telah berjalan perlu terus dilestarikan dan dikembangkan dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, aman, dan tertib bagi seluruh warganya.



**PERLINDUNGAN SOSIAL
PEMBANGUNAN, DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perlindungan sosial adalah sistem yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, tingkat kemiskinan di kota ini tercatat cukup rendah, yaitu hanya 4,3% dari total penduduk pada akhir November 2024, dengan jumlah warga miskin mencapai sekitar 37.800 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan menempatkan Samarinda sebagai salah satu kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Timur.

Mengacu pada populasi Kelurahan Bukit Pinang sekitar 12.266 jiwa, estimasi jumlah penduduk miskin di wilayah ini dapat dirata-ratakan mengikuti proporsi Samarinda, yaitu sekitar $4,3\% \times 12.266 \approx 528$ jiwa. Meskipun bersifat estimasi, angka ini memberikan gambaran bahwa terdapat ratusan keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan dukungan sosial berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran program-program perlindungan sosial seperti BPNT, PKH, dan program pemberdayaan UMKM dalam mengurangi risiko sosial dan ekonomi. Inisiatif seperti pengembangan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi UMKM dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Bukit Pinang. Mengingat tantangan kemiskinan di wilayah perkotaan sering kali tersebar merata dan tidak mudah terlihat, verifikasi data melalui DTKS serta kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang krusial untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi program.

Tabel 9.1 Perlindungan Sosial

No	Paket Layanan Integratif	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Pemberian makanan tambahan PMT/penyuluhan	Ada	-
2	Pelatihan kader	-	Tidak Ada
3	Insentif Kader	Ada	-
4	Kelas ibu hamil	-	Tidak Ada
5	Kelas ibu balita	-	Tidak Ada
6	PMT ibu hamil KEK/ risiko tinggi dari keluarga miskin	-	Tidak Ada
7	Akses air minum aman	-	Tidak Ada
8	Akses Jamban sehat	-	Tidak Ada
9	Jaminan kesehatan ibu hamil dari keluarga miskin	-	Tidak Ada

No	Paket Layanan Integratif	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
10	Jaminan kesehatan untuk anak baduta dari keluarga miskin	-	Tidak Ada
11	Akta kelahiran untuk bayi dari keluarga miskin	Ada	-
12	Kelas Pengasuhan	-	Tidak Ada
13	Pemanfaatan pekarangan keluarga dan tanah desa	Ada	-

Dari 13 layanan yang tercantum, hanya 4 layanan yang tersedia: PMT ibu hamil, insentif kader, akta kelahiran, dan kelas pengasuhan. Mayoritas layanan (9 dari 13) belum tersedia, terutama yang berkaitan dengan akses dasar seperti air minum aman, jamban sehat, pelatihan kader, dan jaminan kesehatan untuk ibu dan anak miskin.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial di Kelurahan Bukit Pinang masih memiliki banyak kekurangan, terutama pada aspek preventif dan dukungan kesehatan dasar bagi kelompok rentan. Data ini bisa menjadi dasar penting untuk penguatan program intervensi sosial ke depan.

Kegiatan pembangunan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti :

Tabel 9. 2 Kegiatan Pembangunan Masyarakat

No	Program Kegiatan Pembangunan Masyarakat	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Sarana prasarana energi	-	Tidak Ada
2	Sarana prasarana sanitasi dan air bersih	-	Tidak Ada
3	Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam	-	Tidak Ada
4	Pengembangan energi terbarukan	-	Tidak Ada
5	Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan	Ada	-
6	Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana	Ada	-

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar program pembangunan fisik belum tersedia di wilayah ini. Sarana prasarana energi, sanitasi dan air bersih, fasilitas penanggulangan bencana, serta pengembangan energi terbarukan seluruhnya

tercatat belum ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan signifikan di Kelurahan Bukit Pinang.

Di sisi lain, dua program yang bersifat non-fisik telah berjalan, yaitu program pengelolaan lingkungan permukiman dan kelurahan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana. Keberadaan dua program ini mencerminkan adanya upaya untuk membangun kesadaran kolektif warga terhadap isu lingkungan dan risiko kebencanaan, meskipun belum diikuti dengan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa arah pembangunan masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang masih lebih berfokus pada pendekatan edukatif dan partisipatif, namun membutuhkan penguatan pada aspek fisik dan infrastruktur agar dampaknya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.



KETERANGAN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN



KETERANGAN APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN

Aparatur pemerintah adalah perangkat atau lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kebijakan negara. Berikut keterangan umum terkait aparatur pemerintah Kelurahan Bukit Pinang

Tabel 10.1 Keterangan Aparatur Pemerintah Kelurahan

No	Uraian	Keterangan
1	Keberadaan: Kepala Desa/Lurah	Ada
2	Umur Kepala Desa/Lurah	42
3	Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah	Laki-laki
4	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah	S2
5	Tahun mulai menjabat	2018
6	Keberadaan: Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	Ada
7	Umur Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	43
8	Jenis kelamin Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	Perempuan
9	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	Diploma IV/S1
10	Tahun mulai menjabat	2021
11	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	Ada
12	Jika R1603a terisi ada, maka keberadaan anggota perempuan	Ada
13	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2023	2

Data menunjukkan bahwa Kelurahan Bukit Pinang memiliki struktur pemerintahan yang lengkap dan berjalan aktif. Kepala Kelurahan adalah laki-laki berusia 42 tahun dengan pendidikan S2, dimana Lurah menjabat sejak 2018. Sekretaris Kelurahan adalah perempuan berusia 43 tahun dengan pendidikan Diploma IV/S1, menjabat sejak 2021. Keberadaan Lembaga Musyawarah Kelurahan beserta keterwakilan perempuan juga telah terpenuhi. Pada tahun 2023, tercatat dua kali kegiatan musyawarah dilaksanakan. Secara keseluruhan, aparatur kelurahan menunjukkan kapasitas SDM yang cukup baik, meskipun frekuensi musyawarah masih tergolong rendah dan dapat ditingkatkan.

Perangkat daerah adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menyediakan layanan kepada masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa perangkat Kelurahan Bukit Pinang:

Tabel 10. 2 Perangkat Kelurahan Bukit Pinang

No	Aparatur Pemerintah	Jumlah
1	Sekretaris Desa/Kelurahan	0
2	Pelaksana Teknis	3
3	Pelaksana Kewilayahan	21
4	Pegawai Kelurahan	51

Data ini mengindikasikan bahwa struktur pelaksana pemerintahan di tingkat kelurahan sudah memiliki tenaga fungsional yang cukup untuk mendukung operasional kelurahan sehari-hari. Meskipun Sekretaris Kelurahan secara administratif telah disebutkan dalam tabel sebelumnya, tidak tercatat dalam tabel perangkat ini, kemungkinan karena perbedaan klasifikasi jabatan. Dengan total 10 personel yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis dan kewilayahan, kapasitas kelurahan dinilai cukup untuk melaksanakan tugas pemerintahan, namun tetap perlu ditinjau lebih lanjut apakah jumlah dan distribusi tugas tersebut telah proporsional terhadap beban kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

The image features a repeating geometric pattern of stylized, four-pointed star or floral motifs in a light orange color on a white background. The pattern is consistent across the top and bottom sections of the page. At the top right, there is a dark teal header with orange and white diagonal stripes. A solid orange horizontal band spans the width of the page, containing the main text.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA